RENCANA KERJA TAHUN 2027

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH



KATA PENGANTAR

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan dalam periode Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang hendak dicapai.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2027 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari pendahuluan, evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun sebelumnya, tujuan, sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen perencanaan satuan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan/subkegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) BAPPERIDA Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2027. Di samping itu juga untuk melakukan reviu atas hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Rencana Kerja Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Barabai, 27 Juli 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

MUHIDDIN, S. P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008

Catatan
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani **secara elektronik** menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan **BSrE**, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3. Maksud dan Tujuan 6

1.4. Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 36

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 43

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2027..... 49

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ... 73

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027 73

2.7. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 76

2.8. Inovasi Perangkat Daerah 77

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 79

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 79

3.2. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 80

3.3. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 82

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 87

BAB V PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 102

5.1. Indikator Kinerja Utama Tahun 2027 102

5.2. Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027 103

BAB VI PENUTUP **106**

6.1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian 106

6.2. Kaidah Pelaksanaan 107

6.3. Rencana Tindak Lanjut 108

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026	11
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	37
Tabel	2.3	Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2025	42
Tabel	2.4	Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025	42
Tabel	2.5	Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2027 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	50
Tabel	2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027 Kabupaten Hulu Sungai Tengah	73
Tabel	2.7	Usulan Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2027	77
Tabel	3.1	Tujuan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2027	79
Tabel	3.2	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2027	80
Tabel	3.3	Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah	83
Tabel	4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Bapperida Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028	73
Tabel	5.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	102
Tabel	5.2	Indikator Kinerja Utama (IKK)	103

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) untuk periode tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk satu periode 1 (satu) tahun, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Proses penyusunan Renja PD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup tahap perumusan rancangan Renja dan tahap penyajian rancangan Renja.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, maka disusunlah Renja sebagai bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2027 ini tentunya mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya seperti mengacu pada Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027 sehingga dokumen perencanaan berjalan secara linier dan berhubungan serta kinerjanya bisa di evaluasi dan terukur.

Bapperida sebagai satuan organisasi perangkat daerah merupakan unit kerja yang menjalankan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan, riset dan inovasi untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan demikian diperlukan Bapperida yang handal yang didukung oleh

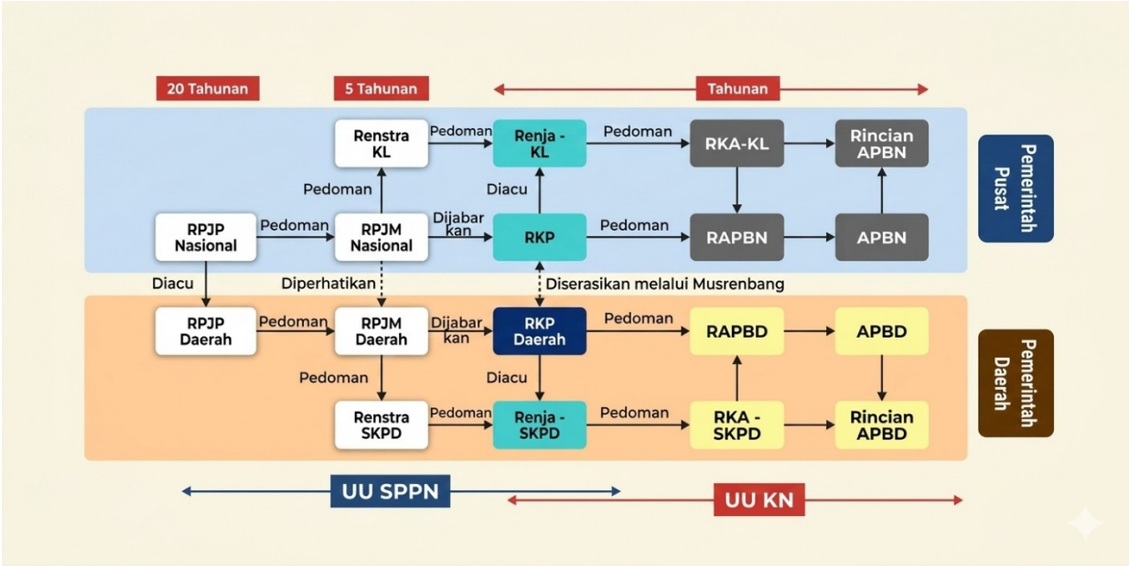
kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027, Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra PD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Renstra PD mempunyai posisi yang sangat strategis di dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu sebagai penjabaran RPJMD. Renstra PD selanjutnya akan dijabarkan secara lebih rinci dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yang merupakan rencana kerja untuk periode satu tahun.

Selanjutnya dokumen Renja PD yang telah tersusun, menjadi acuan bagi Perangkat Daerah sebagai organisasi/instansi pengguna anggaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD). RKA-PD tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai input dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), sebelum nanti akhirnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dokumen RKA-PD kemudian akan digunakan sebagai input dalam penyusunan Laporan Kinerja PD, Laporan Kinerja Anggaran PD, dan Laporan Kinerja Organisasi PD.

Keterkaitan antara Renja PD dengan proses perencanaan dan penganggaran dalam Sistem Perencanaan Pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut ini:



1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Bapperida mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6232);
18. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tenang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah;
20. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Permendagri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 142);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 37 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 44);

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini tersedianya dokumen Perencanaan Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk 1 (satu) periode tahun dalam rangka menjabarkan Renstra sebagai arah pelaksanaan pembangunan.

Tujuan dari penyusunan ini adalah sebagai pedoman bagi Bapperida dalam menyusun program dan kegiatan pada tahun 2027 yang dilengkapi dengan sasaran kinerja dan kebutuhan pendanaan serta prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.6 Permasalahan dan Isu Strategis Tahun 2027
- 2.7 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 2.8 Inovasi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
- 3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 5.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2027
- 5.2 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2027

BAB VI PENUTUP

- 6.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
- 6.2 Kaidah Pelaksanaan
- 6.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan permasalahan yang dihadapi. Kajian (*review*) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2026 yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun lalu (2025) dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah hingga tahun berjalan (2026), menunjukkan progres yang bervariasi di setiap indikator kinerja. Pada tahun 2025, Bapperida menjalankan 4 (empat) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, dan 49 (empat puluh Sembilan) subkegiatan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (5.01.01), sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang sangat baik dan konsisten. Persentase kegiatan tepat waktu, persentase laporan tepat waktu, dan persentase aduan/keluhan antar bidang yang ditindaklanjuti berhasil mencapai 100% baik pada tahun 2025 maupun perkiraan capaian Renstra hingga 2026. Hal ini mencerminkan efektivitas dan responsivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas penunjang. Namun, pada indikator Nilai Audit Kearsipan Perangkat Daerah, angka realisasi tahun 2025 sebesar 91,91 (kategori AA/sangat memuaskan) merupakan angka hasil audit tahun 2025, dengan tingkat realisasi 91,91%. Hingga awal tahun 2026 proses audit untuk pelaksanaan tahun 2025 masih berlangsung.

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (5.01.02) juga menunjukkan kinerja yang positif. Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu mencapai 100% pada

tahun 2025 dan perkiraan capaian tahun 2026. Demikian pula, persentase PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90% menunjukkan realisasi 92,67% pada tahun 2025, dengan tingkat realisasi yang sama dan perkiraan capaian Renstra 2026 sebesar 93%, melebihi target yang ditetapkan. Adanya aplikasi SIMONTOK (untuk pelaporan capaian kinerja RKPD/Renja) dan SIPDAH (Sistem Informasi Dana Alokasi khusus, untuk pelaporan capaian realisasi DAK fisik dan nonfisik) sangat membantu pelaporan evaluasi kinerja.

Untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (5.01.03), semua indikator, yaitu persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD, persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD, dan persentase keselarasan program nasional, provinsi, dan daerah, mencapai 100% pada tahun 2025 dan perkiraan capaian Renstra 2026. Ini menunjukkan upaya yang kuat dalam memastikan keselarasan perencanaan di berbagai tingkatan, berupa koordinasi yang baik dengan perangkat daerah dan setiap rekomendasi ditindaklanjuti dengan baik oleh perangkat daerah.

Pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah (5.05.02), indikator persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan memiliki target Renstra 75%, namun realisasi tahun 2025 hanya mencapai 25% dan perkiraan capaian 2026 adalah 55%, dengan tingkat capaian Renstra 73%. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun 2025 ke 2026, masih belum mencapai target Renstra. Begitu pula dengan persentase HAKI yang difasilitasi, target Renstra sebesar 60% tetapi realisasi dan perkiraan capaian hingga 2026 masih 0%.

Pada Program Riset dan Inovasi Daerah (5.05.03), indikator Persentase pertumbuhan inovasi yang memiliki target Renstra 100% menunjukkan realisasi dan perkiraan capaian hingga 2026 sebesar 0% karena belum ada inovasi yang diluncurkan untuk awal tahun 2026.

Secara keseluruhan, evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah telah berhasil mencapai sebagian besar target pada program-program inti penunjang dan perencanaan. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian, fasilitas HAKI, dan pertumbuhan inovasi di daerah, yang memerlukan strategi dan intervensi yang lebih fokus di masa mendatang.

Rincian hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan capaian Renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
	PERENCANAAN										
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	persentase kegiatan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Persentase laporan tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Nilai audit kearsipan perangkat daerah	100		100	91,91	91,91%	100	91,91	91,91%	
		Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
		evaluasi kinerja PD tepat waktu									
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dok						0%	0%	
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 dok		1	1	100%	1	2,00	40%	
5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10 dok		1	2	200%	2	4,00	40%	
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	5 dok		1	1	100%	1	2,00	40%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
		Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	10 dok		2	2	100%	2	4,00	40%	
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 dok		2	2	100%	4	6,00	30%	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1792 OB		224	224	100%	364	588,00	33%	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dok		1	1	100%	12	13,00	22%	
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 dok		12	12	100%	12	24,00	40%	
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 lap		1	1	100%	1	2,00	40%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 dok		4	4	100%	4	8,00	40%	
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 dok		1	1	100%	1	2,00	40%	
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar	100%		100%	94,72%	94,72%	100%	95%	95%	
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	60 lap		12	4	33,33%	12	16,00	27%	
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai PD yang terlayani	100%		100%	96,93%	96,93%	100%	97%	97%	
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana	5 unit		2	2	100,00 %	1	3,00	60%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
	Prasarana Disiplin Pegawai	dan Prasarana Disiplin Pegawai									
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	8 paket		1	1	100,00 %	0	1,00	13%	
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	120 dok		20	20	100,00 %	20	40,00	33%	
5.01.01.2.05.0007	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang		5	0	0	5	5,00	20%	
5.01.01.2.05.0008	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	125 orang		10	10	100,00 %	10	20,00	16%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%		100%	70,02%	70,02%	100%	70%	70%	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 paket		1	1	100%	1	2,00	40%	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket		1	1	100%	1	2,00	29%	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket		1	1	100%	1	2,00	40%	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket		1	1	100%	1	2,00	40%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.01.2.06.00006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2180 dok		730	730	100%	365	1.095,00	50%	
5.01.01.2.06.00008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 lap		4	4	100%	4	8,00	13%	
5.01.01.2.06.00009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 lap		4	4	100%	4	8,00	40%	
5.01.01.2.06.00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 dok		0	0	0	0	0	0%	
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi	100%						0	0	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 unit					1	1	14%	
5.01.01.2.07.0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit		0	0		0	0	0%	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%		100%	90,15%	90,15%	100%	90%	90%	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 lap		4	4	100%	4	8	160%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	52 lap		4	4	100%	4	8	15%	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	129 lap		81	81	100%	81	162	126%	
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%		100%	98,94%	98,94%	100%	99%	99%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit		1	1	100%	1	2	40%	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 unit		22	22	100%	22	44	41%	
5.01.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 unit		30	20	66,67%	30	50	36%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit		1	1	100%	1	2	40%	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 unit		20	20	100%	35	55	1100%	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	100%		100%	100%	100%	100%	100,00%	100%	
		% usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan									
		Persentase PD dengan capaian IKU	100%		100%	92,67%	92,67%	100%	92,67%	93%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
		minimal sebesar 90%									
		Persentase PD dengan MR berjalan baik	100%								
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya	100%						0	0	
		% partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan	100%						0	0	
5.01.02.2.01.00 01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 dok		0	0		0	0	0%	
5.01.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	7 BA		2	2	100%	1	3	43%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	4 BA		0	0		0	0	0%	
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	7 BA		2	2	100%	1	3	43%	
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	3510 usulan		0	0		0	0	0%	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	11 dok		3	3	100%	2	5	45%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan	100%						0	0	
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	288 orang		0	0		72	72	25%	
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% PD yang menyusun MR	100%						0	0	
		% program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi	100%						0	0	
5.01.02.2.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	96 Kerja-sama		0	0		0	0	0%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	22 lap		8	8	100%	2	10	45%	
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	% ketersediaan data dan informasi	92%					91%	91%	99%	
		% ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD	100%					100%	100%	100%	
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3 dok		0	0		0	0	0%	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI	persentase keselarasan RKPD dg	100%		100%			100%	100%	100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
	DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	RPJMD									
		% keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%		100%			100%	100%	100%	
		% keselarasan program nasional, provinsi dan daerah	100%		100%			100%	100%	100%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.03.2.01.00 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	10 dok		2	2	100%	2	4	40%	
5.01.03.2.01.00 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5 lap		1	1	100%	2	3	60%	
5.01.03.2.01.00 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang	10 dok		2	2	100%	2	4	40%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
	Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)									
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5 lap		1	1	100%	2	3	60%	
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.01.03.2.02.00001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 dok		2	2	100%	2	4	40%	
5.01.03.2.02.00004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5 lap		1	1	100%	1	2	40%	
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	10 dok		2	2	100%	2	4	40%	
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5 lap		1	1	100%	1	2	40%	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% hasil kelitbangan yang termanfaatkan	75%		25%			55%	55%	73%	
		% HAKI yang difasilitasi	60%						0%	0%	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%						0%	0%	
5.05.02.2.01.0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3 lap		1	1	100%	1	2	67%	
5.05.02.2.02	Penelitian dan	% penelitian / kajian	100%						0	0%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
	Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	yang sesuai dengan isu strategis daerah									
5.05.02.2.02.00005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 topik		0	0		0	0	0%	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%						0	0%	
5.05.02.2.02.00004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dok		0	0	0	0	0	0%	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	% pertumbuhan usulan HAKI	100%						0	0%	
5.05.02.2.04.00003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan	5 lap		1	1	100%	1	2	40%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
	Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif									
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5 lap		1	1	100%	1	2	40%	
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase pertumbuhan inovasi	100%						0	0%	
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi	100%						0	0%	
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	4 lap		0	0		1	1	25%	

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)s.d. akhir tahun Periode Renstra (2029)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2025			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan (2026)		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2025	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=[7/6]	9	10=[5+7+9]	11=[10/4]	12
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	% kaji terap yang berhasil dilaksanakan	100%						0	0%	
5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pema n- tauan		0	0		0	0	0%	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Analisis terhadap capaian kinerja pelayanan Bapperida dilakukan berdasarkan indikator kinerja tujuan dan sasaran Renstra serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Dari hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Bapperida sampai dengan tahun 2026 dan perkiraan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)											
1	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		IKU	98,00	99,00	99,00	100,00	97,00	97,00	99,00	100,00	
2	Indeks Inovasi Daerah		IKU	48	56	66	78	46,75	46,75	66	78,00	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)											
3	Indeks Perencanaan		IKU	97	98	99	99,5	100	100	99	99,50	
4	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP		IKU	22,9	24,5	26	28	22,64	22,64	26	28,00	
5	Persentase Capaian IKU RKPD		IKU	94,00	95,00	95,00	96,00	92,00	92,00	95,00	96,00	
6	Persentase PD yang Berkinerja Tinggi		IKU	89,00	90,00	90,00	91,00	92,00	92,00	92,00	92,00	
7	Rata-rata Tingkat Kematangan Inovasi Daerah		IKU	60,00	65,00	70,00	75,00	60,00	60,00	70,00	75,00	
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		IKU	84,5	85,1	85,75	86,25	80,2	80,2	85,75	85,75	
9	Indeks Inovasi Perangkat Daerah		IKU	45	50	55	60	75,68	75,68	77	77	
10	Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan		IKU	75	76	77,5	80	84,028	84,028	85	85	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)											
11	Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90 %		IKK	92,67	93,67	94,67	95,67	91,97	91,97	94,67	95,67	
14	Persentase PD dengan MR berjalan baik		IKK	0	10	25	40	0	0	25	40	
15	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase HAKI yang difasilitasi		IKK	50	50	60	65	50	50	60	65	
20	Persentase pertumbuhan inovasi		IKK	0	10	11	12	0	0	11	12	
21	Persentase kegiatan tepat waktu		IKK	100	100	100	100	97	97	100	100	
22	Persentase laporan tepat waktu		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
23	Nilai audit kearsipan perangkat daerah		IKK	92	93	94	95	91,91	91,91	93	94	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)											
25	Persentase pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase ketersediaan data dan informasi		IKK	90	91	92	93	90	90	92	93	
29	Persentase ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
30	Persentase PD yang menyusun MR		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi		IKK	87,31	88,81	90,31	91,81	87,31	87,31	90,31	91,81	
32	Persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja PD)		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
33	Persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Renja PD											
34	Persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
35	Persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
38	Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
41	Persentase pertumbuhan usulan HAKI		IKK	5	5	5	10	33	33	5	10	
42	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi		IKK	0	5	5	5	0	0	5	5	
43	Persentase kaji terap yang berhasil dilaksanakan		IKK	5	5	5	5	0	0	5	5	
44	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
45	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
46	Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar		IKK	100	100	100	100	95	95	100	100	
47	Persentase pegawai PD yang terlayani		IKK	100	100	100	100	96,93	96,93	100	100	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU/IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar		IKK	100	100	100	100	100	100	100	100	
49	Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi		IKK	100	100	100	100	98	98	100	100	
50	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia		IKK	100	100	100	100	90,15	90,15	100	100	
51	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara		IKK	100	100	100	100	98,94	98,94	100	100	

Analisis atas capaian kinerja terhadap perjanjian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Persentase capaian target kinerja jangka menengah daerah (RPJMD)	98%	97%	98,98
		Indeks Inovasi Daerah	48	46,75	97,4

Dari 2 (dua) tujuan strategis organisasi yang akan dicapai pada tahun 2025, realisasi tingkat capaiannya masuk dalam kategori capaian *sangat baik*. Dengan demikian tujuan organisasi telah tercapai dengan baik. Untuk pencapaian sasaran strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	97	100	100
		Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	22,9	22,64	98,86
2	Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah	Persentase capaian IKU RKPD	94	92	97,87
		% PD yang berkinerja tinggi	89,24	91,67	100
3	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah	60	59,97	99,95
4	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	84,5	80,2	94,91
		Indeks Inovasi Perangkat Daerah	45	75,68	100
		Tingkat kepuasan layanan	75	84,028	100

		kesekretariatan			

Pencapaian sasaran pertama yaitu meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah maka untuk mengukurnya ada 2 (dua) indikator kinerja yang digunakan dengan rata-rata capaian adalah 99,43 %, dengan kategori capaian sangat baik. Pada sasaran kedua yaitu meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan 2 (dua) indikator, maka rata-rata capaiannya adalah 98,94 % atau kategori sangat baik. Pada sasaran ketiga yaitu meningkatnya kualitas inovasi daerah, ada 1 (satu) indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan realisasi tingkat capaian indikator 99,95 %, masuk kategori sangat baik. Pada sasaran keempat yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah, dengan 3 (tiga) indikator, rata-rata capaiannya adalah 98,30 %, juga masuk kategori sangat baik. Dari indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa target sasaran strategis organisasi semuanya telah tercapai dengan sangat baik.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bertugas membantu dan mendukung Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta riset dan inovasi daerah. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang, maka permasalahan pokok yang dirasakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapperida adalah sebagai berikut: Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah, belum optimalnya kinerja pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah, belum tingginya inovasi pemerintah daerah, serta belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah.

Hasil evaluasi kinerja Bapperida dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026 menunjukkan capaian yang hampir memenuhi target pada program penunjang dan koordinasi perencanaan. Hal ini karena adanya dukungan kekuatan digitalisasi antara lain pemanfaatan aplikasi SIMONTOK (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja) dan SIPDAH (Sistem Informasi Dana Alokasi Khusus) untuk pelaporan capaian realisasi DAK fisik dan nonfisik, terbukti efektif dalam memastikan pelaporan kinerja dan realisasi DAK berjalan presisi. Selain itu juga adanya harmonisasi kebijakan yaitu keselarasan antara dokumen RKPD, RPJMD, hingga program nasional menandakan bahwa fungsi koordinasi Bapperida terhadap perangkat daerah lainnya telah berjalan optimal. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan optimalisasi kinerja pembangunan daerah, diperlukan penguatan pada aspek tata kelola penyusunan dokumen yang didukung oleh data yang akurat, teknologi terintegrasi, serta SDM perencana yang kompeten. Langkah ini diperkuat dengan peningkatan sinergitas koordinasi baik internal maupun antar-pemerintah daerah, penguatan sistem pengukuran kinerja, serta optimalisasi fungsi pengendalian dan evaluasi melalui penerapan manajemen risiko perencanaan yang sistematis.

Isu penting di bidang penelitian dan pengembangan (litbang) saat ini ditandai dengan belum optimalnya kualitas hasil litbang dan inovasi daerah. Kondisi ini dipicu oleh ketiadaan SDM peneliti yang kompeten serta masih rendahnya budaya inovasi di lingkungan Perangkat Daerah (PD). Selain itu, pengelolaan data dan informasi pendukung yang belum optimal, lemahnya identifikasi terhadap kebutuhan riil litbang, serta terbatasnya diseminasi hasil-hasil penelitian menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan daerah. Kendala tersebut juga dipengaruhi oleh belum terbangunnya jejaring litbang yang kuat, sehingga kolaborasi antarlembaga dalam menciptakan ekosistem inovasi daerah yang terintegrasi belum dapat terwujud secara maksimal. Selanjutnya, belum optimalnya capaian fasilitasi HAKI dilatarbelakangi oleh keterbatasan alokasi dukungan anggaran, minimnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan kekayaan intelektual, serta belum optimalnya diseminasi informasi mengenai prosedur pengajuan HAKI.

Dari uraian di atas, maka isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelayanan Bapperida adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan yang berkualitas yang mempertimbangkan keselarasan dan konsistensi aspek tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, serta perencanaan pusat dan provinsi serta kepentingan masyarakat.
2. Efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan penerapan manajemen risiko.
3. Peningkatan inovasi untuk pencapaian kinerja yang didukung juga dengan perbaikan kebijakan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian sebagai bahan perencanaan pembangunan.
4. Peningkatan tata kelola pelaksanaan urusan perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berikut beberapa permasalahan yang ditemukan pada penyelenggaraan tugas dan fungsi Bapperida yang berkaitan dengan rencana kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya apabila ditinjau dari hasil evaluasi atas isu-isu strategis yang dihadapinya adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kinerja pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah.
3. Belum tingginya inovasi pemerintah daerah.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah.

Hambatan yang Dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Bapperida sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi SDM Perencana dan Peneliti: belum tersedianya tenaga fungsional peneliti yang kompeten serta masih perlunya peningkatan kapasitas SDM perencana dalam mengelola perencanaan kinerja yang berkualitas dan inovatif.
2. Belum Terintegrasinya Tata Kelola Data dan Informasi Pembangunan: Meskipun pelaporan digital sudah berjalan, namun

pengelolaan basis data pendukung untuk identifikasi kebutuhan litbang dan informasi hasil pembangunan secara umum belum optimal dan belum terpadu.

3. Rendahnya Budaya Inovasi dan Lemahnya Jejaring Litbang: Masih terbatasnya komitmen inovasi di lingkungan Perangkat Daerah (PD) serta belum terbangunnya ekosistem dan jejaring penelitian yang kuat untuk kolaborasi antarlembaga.
4. Terbatasnya Penerapan Manajemen Risiko dalam Perencanaan: Belum optimalnya integrasi mitigasi risiko ke dalam proses perencanaan, sehingga berdampak pada belum maksimalnya pencapaian sasaran kinerja pembangunan daerah.
5. Kelemahan pada Kualitas Pengukuran Kinerja, Pengendalian, dan Evaluasi: Instrumen pengukuran kinerja yang ada belum sepenuhnya presisi dalam memotret capaian riil di lapangan, serta fungsi pengendalian pelaksanaan rencana yang belum efektif.
6. Keterbatasan Dukungan Fiskal dan Strategi Diseminasi: Alokasi anggaran yang terbatas serta belum optimalnya diseminasi informasi seputar HAKI dan hasil litbang, yang berimplikasi pada rendahnya kesadaran masyarakat dan efektivitas kebijakan.
7. Masih Lemahnya Sinergitas dan Kolaborasi Lintas Sektor: Belum kuatnya koordinasi dan kolaborasi baik secara internal maupun antar-pemerintah daerah, serta belum tersedianya acuan rencana aksi yang terpadu sebagai landasan pelaksanaan program.

2.3.2. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

Bapperida sebagai unsur pendukung kepala daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan Misi ke-4 Bupati, yaitu *mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional*. Dampak dari adanya permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan fungsi Bapperida yang diuraikan di atas berimplikasi pada belum optimalnya pencapaian misi kepala daerah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional.

Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja dan lemahnya integrasi manajemen risiko menyebabkan birokrasi menjadi kurang responsif (tanggap) terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan potensi kendala di lapangan. Ketidakterpaduan data serta rendahnya kompetensi SDM perencana dan peneliti mengakibatkan pengambilan

kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berbasis pada data yang akurat *(evidence-based policy*), yang merupakan pilar utama tata kelola profesional.

Selain itu, rendahnya budaya inovasi dan lemahnya sinergitas lintas sektor menghambat terciptanya layanan publik yang efektif dan efisien. Jika hambatan seperti lemahnya pengukuran kinerja dan keterbatasan diseminasi informasi terus berlanjut, maka transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah akan sulit terpenuhi, sehingga visi besar untuk menghadirkan pemerintahan yang tanggap dan profesional terancam tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

Berikut beberapa tantangan dan peluang bagi Bapperida dalam meningkatkan kualitas pelayanannya:

a. Tantangan

1. Mewujudkan budaya kerja yang inovatif dengan mengubah pola pikir aparatur agar lebih kreatif dan adaptif dalam menciptakan inovasi pelayanan di seluruh perangkat daerah;
2. Mewujudkan sistem informasi pembangunan terpadu yang valid dan terintegrasi sehingga memudahkan penyajian data perencanaan dan menunjang pelaporan;
3. Pemenuhan tenaga ahli khususnya perencana dan peneliti yang kompeten untuk mendukung perencanaan berbasis data dan aturan;
4. Menerapkan manajemen risiko dalam perencanaan guna menjaga tingkat ketanggapan pemerintah terhadap dinamika ekonomi dan sosial.

b. Peluang

1. Pengembangan sistem digital dengan memperluas penggunaan aplikasi yang terintegrasi untuk menjamin data yang lebih akurat dan transparan;

2. Penguatan jejaring kemitraan dengan akademisi dan lembaga riset untuk membantu memperkuat kajian pembangunan dan inovasi daerah;
3. Pengembangan sistem evaluasi yang tepat untuk pengukuran kinerja yang lebih dan memantau pencapaian visi-misi Bupati secara cepat;
4. Pemanfaatan kanal informasi digital untuk menyosialisasikan hasil pembangunan dan fasilitasi HAKI, guna meningkatkan partisipasi serta kesadaran masyarakat.

2.3.4. Formulasi tindak lanjut dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

1. Menyusun program dan kegiatan prioritas yang selaras dengan sasaran strategis serta mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja dengan menetapkan indicator dan target yang jelas, terukur, dan realistis;
3. Mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara konsisten untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program;
4. Memanfaatkan data dan informasi yang akurat sebagai dasar dalam penentuan prioritas program dan kegiatan;
5. Pemenuhan formasi tenaga peneliti dan perencana untuk mendukung kebijakan berbasis data;
6. Integrasi dan digitalisasi aplikasi perencanaan dan pelaporan guna menjamin keakuratan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi kinerja;
7. Menyusun regulasi dan skema insentif inovasi bagi Perangkat Daerah, serta memperkuat fungsi pendampingan dalam pengajuan fasilitasi HAKI dan diseminasi hasil litbang kepada masyarakat;
8. Implementasi manajemen risiko dalam perencanaan;
9. Penguatan sinergitas lintas sektor dan jejaring kemitraan;
10. Meningkatkan sosialisasi hasil-hasil pembangunan dan capaian kinerja melalui kanal digital guna membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi Masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2027

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027 adalah **"PENGUATAN DAYA SAING SDM DAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKESINAMBUNGAN SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERAKHLAK"**

Ada 4 (empat) prioritas pembangunan dalam RKPD yaitu :

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
b. Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan
c. Penanggulangan Kemiskinan
d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Untuk mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Sbadan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian, pengembangan, riset dan inovasi daerah.

Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten HST Tahun 2027 terhadap hasil analisis kebutuhan Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5
Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2027 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH								
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
	PERENCANAAN								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kegiatan tepat waktu	100	6.636.799.696,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kegiatan tepat waktu	100	8.212.262.926,00	
		Persentase laporan tepat waktu	100			Persentase laporan tepat waktu	100		
		Nilai audit kearsipan perangkat daerah	100			Nilai audit kearsipan perangkat daerah	100		
		Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti	100			Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti	100		
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu	100%	63.204.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu	100%	55.098.448,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	12.704.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	10.425.420,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	17.360.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dok	8.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dok	6.932.560,00	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	6.774.240,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dok	7.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dok	5.347.100,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 doK	8.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 doK	8.259.128,00	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	100%	4.173.683.200,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	100%	4.180.975.892,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 OB	3.900.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 OB	3.900.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	204.000.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	211.440.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	5.183.200,00	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	5.080.120,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	20.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	20.471.590,00	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dok	42.000.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dok	41.984.380,00	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 dok	2.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1 dok	1.999.802,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Realisasi Anggaran	Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar	100%	5.353.800,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar	100%	5.348.000,00	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.353.800,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.348.000,00	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai PD yang terlayani	100%	254.665.496,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai PD yang terlayani	100%	259.461.948,00	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	7.729.996,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	12.243.600,00	Adanya kenaikan harga ATK
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	130.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 paket	130.500.000,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	24 dok	13.160.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	24 dok	14.443.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kepegawaian				Kepegawaian			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	48.275.500,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 Orang	48.275.148,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	55.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	54.000.000,00	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	713.512.200,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	1.275.343.478,00	
	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.244.000,00	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.240.600,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	200.260.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	582.020.200,00	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang ada saat ini berusia lebih dari 5 tahun dan mengalami penyusutan nilai, sehingga perlu diganti dengan yang baru dan lebih berkualitas
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	71.274.200,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	71.272.650,00	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.999.718,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	3.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	2.820.000,00	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.600.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	49.550.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	320.634.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	502.405.000,00	ada kenaikan biaya akomodasi dan transportasi sehingga biaya rapat meningkat
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	45.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	44.035.310,00	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi	100%	550.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi	100%	1.028.323.000,00	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 unit	500.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 unit	998.323.000,00	Kendaraan dinas yang ada saat ini berusia lebih dari 5 tahun dan telah mengalami penyusutan nilai, sehingga perlu diganti dengan kendaraan baru dan lebih baik Bapperida memerlukan kendaran dinas

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									yang memadai untuk mendukung kegiatan Operasional
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	30.000.000,00	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	431.659.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	963.248.000,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.613.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.612.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	72.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	72.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	358.046.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	889.636.000,00	Ada penambahan gaji untuk tenaga P3K paruh waktu; Ada penambahan jumlah tenaga outsourching ada tambahan anggaran untuk tenaga *outsourcing* yang mempunyai keahlian khusus
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	444.722.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	444.464.160,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	68.814.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	68.785.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	221.608.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	221.598.960,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	36.600.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	36.500.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	99.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	98.980.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	18.700.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	18.600.000,00	
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	100%	2.741.458.610,00	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	100%	2.165.526.220,00	
		% usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan				% usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan			
		Persentase PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90%				Persentase PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90%			
		Persentase PD dengan MR berjalan baik				Persentase PD dengan MR berjalan baik			
2.1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya	100%	2.356.690.970,00	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya	100%	1.778.480.900,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		% partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan	100%			% partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan	100%		
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dok	30.755.000,00	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 dok	30.767.000,00	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	59.308.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	60.486.700,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 BA	122.160.300,00	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 BA	147.209.300,00	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	216.146.500,00	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 BA	196.537.300,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1160 usulan	10.604.300,00	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1160 usulan	10,614,300	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dok	1.917.716.870,00	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 dok	1.343.480.600,00	
2.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan	100%	136.336.100,00	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan	100%	136.419.600,00	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	72 orang	136.336.100,00	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	72 orang	136.419.600,00	
2.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% PD yang menyusun MR	100%	216.521.540,00	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% PD yang menyusun MR	100%	218.657.220,00	
		% program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi	100%			% program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi	100%		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	32	40.585.300,00	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	32	41.526.020,00	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 lap	175.936.240,00	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 lap	177.131.200,00	
2.4	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	% ketersediaan data dan informasi	92%	31.910.000,00	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	% ketersediaan data dan informasi	92%	31.968.500,00	
		% ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD	100%			% ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD	100%		
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dok	31.910.000,00	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dok	31.968.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase keselarasan RKPD dg RPJMD	100%	1.199.874.830,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase keselarasan RKPD dg RPJMD	100%	1.363.691.280,00	
		% keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%			% keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%		
		% keselarasan program nasional, provinsi dan daerah	100%			% keselarasan program nasional, provinsi dan daerah	100%		
3.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	651.792.800,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	673.183.940,00	
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%			% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	2 Dokumen	46.357.750,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir	2 Dokumen	50.114.480,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	147.076.750,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	103.215.280,00	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 dok	150.211.900,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 dok	65.011.380,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	308.146.400,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	454.842.800,00	Disamping tugas utama mengawal sinergitas dan harmonisasi PPD Bidang PPM, pada Sub Keg ini juga mengkoordinasikan kegiatan Pro SN di Kab. HST Tahun 2027 terkait bidang PPM, seperti: Penanggulangan Kemiskinan, MBG, TP3S, dan Sekolah Rakyat
3.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	35.000.000,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	34.963.400,00	
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%			% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	35.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	34.963.400,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 lap	225,519,200.00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 lap	225,519,200.00	
3.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	513.082.030,00	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	655.543.940,00	
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%			% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%		

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	34.000.000,00	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	33.611.140,00	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	479.082.030,00	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	621.932.800,00	disesuaikan kebutuhan kegiatan untuk koordinasi dan fasilitasi honorarium Tim Studi EHRA (Enviromental Health Risk Assessment) Kabupaten dan Tim Implementasi SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten) TA 2026-2030, serta belanja jasa tenaga ahli
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% hasil kelitbangan yang termanfaatkan	100%	1.202.358.143,00	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% hasil kelitbangan yang termanfaatkan	100%	933.303.327,00	
		% HAKI yang difasilitasi	60%			% HAKI yang difasilitasi	60%		
4.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%	284.450.590,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%	237.590.800,00	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 lap	284.450.590,00	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 lap	237.590.800,00	
4.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%	350.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%	207.602.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (RP)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 topik	350.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisat	1 topik	207.602.000,00	
4.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%	325.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%	301.113.500,00	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dok	325.000.000,00	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dok	301.113.500,00	
4.5	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	% pertumbuhan usulan HAKI	100%	242.907.553,00	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	% pertumbuhan usulan HAKI	100%	186.997.027,00	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 lap	192.907.553,00	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 lap	153.203.397,00	
	Fasilitasi Hak Kekayaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 lap	50.000.000,00	Fasilitasi Hak Kekayaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan	1 lap	33.793.630,00	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Pagu Indikatif (RP)**	**Program/Kegiatan**	**Indikator Kinerja**	**Target Capaian**	**Kebutuhan Dana (RP)**	**Catatan Penting**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			
5	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase pertumbuhan inovasi	100%	227.000.000,00	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase pertumbuhan inovasi	100%	155.802.230,00	
5.1	Invensi dan Inovasi	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi	100%	127.000.000,00	Invensi dan Inovasi	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi	100%	102.252.950,00	
	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Lap	127.000.000,00	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Lap	102.252.950,00	
5.2	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	% kaji terap yang berhasil dilaksanakan	100%	100.000.000,00	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	% kaji terap yang berhasil dilaksanakan	100%	53.549.280,00	
	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 pemantauan	100.000.000,00	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 pemantauan	53.549.280,00	

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) baik pada tingkat desa maupun kecamatan tidak ada kegiatan yang diusulkan masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bapperida.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2027 Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Nihil				

2.6. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS TAHUN 2027

Analisis terhadap permasalahan pelayanan dan perumusan isu strategis merupakan tahapan penting dalam menyelaraskan kapasitas internal organisasi dengan dinamika lingkungan eksternal yang bergerak dinamis. Melalui evaluasi komprehensif terhadap capaian target Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, implementasi Rencana Kerja (Renja) tahun-tahun sebelumnya, serta dinamika arah kebijakan di tingkat global, nasional, dan regional, maka rumusan permasalahan dan isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk tahun rencana 2027 dapat diuraikan sebagai berikut**:**

2.6.1. Rumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap capaian indikator kinerja pelayanan hingga tahun berjalan, permasalahan pokok yang dihadapi Bapperida adalah **belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan daerah**. Masalah pokok tersebut secara spesifik ditandai oleh beberapa permasalahan operasional dan hambatan substantif, antara lain:

1. Rendahnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dan Kajian

   Realisasi pemanfaatan hasil penelitian untuk perumusan kebijakan daerah baru mencapai 25%. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya identifikasi kebutuhan riil litbang dan terbatasnya diseminasi hasil riset, sehingga pengambilan kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berbasis pada data ilmiah yang akurat (*evidence-based policy*).
2. Belum Optimalnya Pengukuran dan Capaian Inovasi serta Fasilitasi HAKI

   Pengajuan usulan fasilitasi HAKI dari masyarakat masih sangat minim dan capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) juga masih rendah. Kondisi ini dipicu oleh belum meratanya komitmen inovasi di lingkungan Perangkat Daerah serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
3. Keterbatasan Kapasitas dan Kompetensi SDM Perencana dan Peneliti

   Bapperida masih menghadapi tantangan berupa ketiadaan pejabat fungsional peneliti yang kompeten serta perlunya peningkatan kapasitas teknis SDM perencana dalam mengelola penjenjangan kinerja yang selaras dan logis.
4. Terbatasnya Penerapan Manajemen Risiko dalam Perencanaan

   Belum optimalnya pengintegrasian mitigasi dan manajemen risiko ke dalam proses perencanaan tahunan memicu terjadinya bias atau deviasi yang cukup lebar dalam pemenuhan target-target makro daerah, seperti pertumbuhan ekonomi inklusif dan pengentasan kemiskinan.
5. Belum Terpadunya Tata Kelola Data dan Informasi Pembangunan

   Pengelolaan basis data pendukung untuk menunjang pelaporan makro daerah dan pelaporan kelitbangan belum terintegrasi secara optimal. Akibatnya, data capaian pembangunan yang dikumpulkan tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan

2.6.2. Isu Strategis Pembangunan Tahun 2027

Isu strategis merupakan kondisi atau kejadian yang harus diantisipasi dan diprioritaskan dalam kurun waktu satu tahun ke depan karena dampaknya yang signifikan terhadap keberhasilan Pembangunan. Dengan memperhatikan dinamika lingkungan dinamis di berbagai tingkatan, dirumuskan isu strategis utama Bapperida untuk tahun 2027 sebagai berikut:

A. Isu Lingkungan Dinamis (Eksternal)

1. Isu Global (SDGs 2030): Perlunya akselerasi penurunan target 17 indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya dalam pilar pembangunan sosial dan ekonomi, ke dalam dokumen perencanaan daerah.
2. Isu Nasional dan Regional: Keselarasan terhadap 8 (delapan) agenda prioritas pembangunan nasional (Asta Cita RPJMN 2025–2029) serta visi Provinsi Kalimantan Selatan *"Kalsel Bekerja Menuju Gerbang Logistik Kalimantan"*, yang menuntut pemantapan tata kelola pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan.
3. Isu Lokal (Tema RKPD HST 2027): Dukungan penuh terhadap perwujudan tema RKPD Tahun 2027, yaitu "Penguatan Daya Saing SDM dan Perekonomian Daerah yang Inklusif dan Berkesinambungan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Berakhlak".

B. Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Peningkatan Kualitas, Keselarasan, dan Konsistensi Perencanaan: Menjamin konsistensi vertikal dan horizontal antar-dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja PD) dengan tetap mengacu pada arahan spasial Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta daya dukung Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
2. Efektivitas dan Akuntabilitas Perencanaan-Penganggaran Berbasis Risiko: Mengintegrasikan kerangka mitigasi manajemen risiko ke dalam penganggaran tahunan guna meminimalisasi inefisiensi serapan fiskal daerah dan

mendorong pencapaian target kinerja pembangunan yang lebih presisi.

3. Akselerasi Ekosistem Riset, Inovasi, dan Fasilitasi HAKI: Membangun jejaring kemitraan yang kuat dengan akademisi/lembaga riset untuk melahirkan kajian ilmiah yang aplikatif. Langkah ini dibarengi dengan penyusunan regulasi serta skema insentif inovasi yang mampu mendorong kreativitas aparatur di seluruh Perangkat Daerah.
4. Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Integratif: Mengoptimalkan dan memperluas pemanfaatan platform digital (seperti SIPD, SAKTIPUN, dan platform terintegrasi lainnya) demi mewujudkan transparansi data perencanaan, meningkatkan akuntabilitas laporan kinerja SAKIP, serta menaikkan indeks kepuasan layanan publik birokrasi secara professional.

2.7. TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu instrumen penting dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan daerah. Pokir DPRD memuat saran dan pendapat yang didasarkan pada hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses secara berkala. Saran dan pendapat tersebut kemudian diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah guna memberikan solusi atas permasalahan riil di lapangan.

Berdasarkan hasil kompilasi, telaahan, dan verifikasi terhadap usulan Pokir DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang masuk melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah untuk tahun rencana 2027, diketahui bahwa tidak terdapat usulan pokir yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Ketiadaan usulan ini disebabkan oleh karakteristik tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bapperida yang berfokus pada fungsi penunjang pemerintahan—khususnya pada bidang perencanaan, kelitbangan, riset, dan inovasi daerah—bukan pada fungsi pelayanan

infrastruktur atau bantuan sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung.

Tabel 2.7
Usulan Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2027

No	Pengusul	Usulan	Masalah	Alamat Lokasi
1	2	3	4	5
1.	Nihil			

2.8. INOVASI PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mengatasi hambatan administratif serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Tengah terus mendorong terciptanya ekosistem kerja yang adaptif melalui implementasi berbagai inovasi digital. Inovasi-inovasi ini diarahkan untuk menyederhanakan birokrasi, memperkuat transparansi, dan mempercepat tata kelola data pembangunan serta kelitbangan. Adapun inovasi unggulan yang telah dan sedang dikembangkan oleh Bapperida adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi SAKTI-PUN (Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi – Pemerintah Unggul)

   Aplikasi SAKTI-PUN, sebagai pengembangan dari Aplikasi SIMONTOK, merupakan inovasi sistem informasi utama Bapperida yang dirancang sebagai motor penggerak akuntabilitas kinerja daerah. Inovasi ini mengintegrasikan pilar perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja daerah ke dalam satu sistem informasi terpadu. Melalui SAKTI-PUN, seluruh Perangkat Daerah dapat dengan mudah melakukan sinkronisasi target indikator kinerja makro daerah, menyusun Laporan Kinerja dan Laporan Evaluasi Triwulan, serta mengelola manajemen risiko (*risk register*) secara lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

2. Aplikasi SI IDE HST (Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam memacu pertumbuhan inovasi dan mengatasi rendahnya indeks inovasi daerah, Bapperida meluncurkan aplikasi SI IDE HST. Aplikasi ini berfungsi sebagai wadah pengelolaan dan pusat basis data inovasi daerah yang terintegrasi, efektif, dan efisien. Melalui platform ini, setiap admin inovasi dari seluruh SKPD di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat mengajukan, memetakan, dan memantau perkembangan inovasi mereka. Kehadiran SI IDE HST mempermudah proses penilaian mandiri (*self-assessment*) indeks inovasi daerah sekaligus mendorong peningkatan kesadaran publik terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

3. Aplikasi SIAGeNS (Sistem Informasi Agenda Nomor Surat)
   Guna memperkuat tertib administrasi internal dan meningkatkan efisiensi tata kelola *persuratan*, Bapperida mengimplementasikan aplikasi SIAGeNS (*Sistem Informasi Agenda Nomor Surat*). Aplikasi ini dirancang khusus untuk memodernisasi mekanisme penomoran dan pencatatan surat dinas di lingkungan internal Bapperida agar lebih efektif, terintegrasi, dan terdokumentasi dengan baik. SIAGeNS meminimalisasi risiko terjadinya nomor ganda (*overlapping*) serta mempercepat proses pencarian dokumen kedinasan dalam rantai birokrasi harian.

4. Sistem Digitalisasi Tata Kelola Ruang Rapat Berbasis Cloud
   Bapperida juga menerapkan inovasi tata kelola internal berbasis *cloud computing* melalui pemanfaatan lembar kerja digital (*Google sheet*) untuk pengelolaan agenda peminjaman ruang rapat. Inovasi ini mempermudah koordinasi jadwal pertemuan—baik untuk keperluan internal Bapperida maupun fasilitasi bagi SKPD lain—secara langsung (*real-time*). Sistem sederhana namun berdampak ini berhasil menghindarkan kemungkinan tumpang tindih pemakaian ruang (*overlapping*) akibat pencatatan manual.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir atau kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Adapun tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah:

"Meningkatkan Kinerja Pembangunan Jangka Menengah dan Inovasi Daerah"

Dari tujuan strategis tersebut, maka target kinerja yang akan dicapai dari indikator tujuan yang telah ditetapkan adalah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Target Tahun 2027

Tujuan	Indikator Tujuan	Target
Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	99
	Indeks inovasi daerah	66

3.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2025 – 2029 adalah:

a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Meningkatnya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah;
d. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah.

Dari sasaran strategis tersebut, maka target kinerja yang akan dicapai dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan adalah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Tahun 2027

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	99
	Indeks Inovasi Daerah	66
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indeks perencanaan	99
	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	26
Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan daerah pembangunan daerah	Persentase capaian IKU RKPD	95
	Persentase PD yang berkinerja tinggi	91,74
Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah	70
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	85,75
	Indeks Inovasi Perangkat Daerah	76
	tingkat kepuasan layanan kesekretariatan	85

3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah baik berupa program yang mendukung pencapaian RPJMD maupun pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah dalam kurun waktu satu tahun.

3.2.1. Keterkaitan program, kegiatan, subkegiatan di Renja SKPD dengan strategi dalam Renstra SKPD

Program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam Renja Bapperida tahun 2027 merupakan turunan langsung yang sinkron dan konsisten dengan strategi yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Adapun keterkaitan strategi dalam Renstra dengan program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan pilar utama yang menyediakan dukungan administratif, sarana prasarana, serta manajemen sumber daya internal guna memastikan seluruh tugas pokok Bapperida berjalan lancar. Program ini memiliki keterkaitan erat dengan tujuh strategi Renstra.
2. PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH

   Strategi terkait:
   - Peningkatan kualitas litbang dan inovasi daerah.
   - Peningkatan fasilitasi pengajuan HAKI.
3. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

   Strategi terkait:
   - Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
   - Peningkatan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah.
4. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

   Strategi terkait:
   - Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah.
   - Peningkatan perencanaan kinerja perangkat daerah.
   - Peningkatan pelaksanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah.

3.2.2. Konsistensi antara program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah dalam Renja SKPD dengan Renstra SKPD

Renja Bapperida Tahun 2027 menjamin konsistensi perencanaan dengan memastikan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan telah terakomodasi sepenuhnya dalam Renstra Bapperida periode 2025-2029. Sinkronisasi ini menjadi bukti bahwa Bapperida berkomitmen menjalankan mandat perencanaan

pembangunan secara profesional, terukur, dan selaras dengan visi misi daerah.

3.2.3. Konsistensi antara program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah dalam Renja SKPD dengan RKPD

Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2027 telah menjamin asas konsistensi dan keselarasan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027. Sinkronisasi ini menjamin bahwa seluruh aktivitas pembangunan yang direncanakan oleh Bapperida memiliki payung kebijakan yang jelas dan sah dalam dokumen perencanaan daerah.

3.3. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pembangunan daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Mengacu pada rencana pembangunan tingkat nasional dan provinsi, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan empat prioritas pembangunan tahun 2027 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan;
3. Penanggulangan Kemiskinan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.

Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian target nasional. Oleh karena itu, Bapperida berperan strategis dalam mengawal keselarasan program daerah dengan empat prioritas nasional melalui peran-peran berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

   Bapperida berperan sebagai koordinator perencanaan yang memastikan program pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial

antar-perangkat daerah saling terintegrasi untuk menciptakan masyarakat HST yang berdaya saing.

2. Pertumbuhan Ekonomi Berkesinambungan

   Bapperida berperan sebagai penyusun kerangka kebijakan ekonomi yang berbasis riset (litbang) untuk mengidentifikasi potensi lokal yang ramah lingkungan, guna mendukung kemandirian ekonomi daerah yang berkelanjutan.

3. Penanggulangan Kemiskinan

   Bapperida berperan sebagai penyelaras data dan program untuk menjamin pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah tepat sasaran dan sejalan dengan target penghapusan kemiskinan nasional.

4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

   Bapperida berperan sebagai penggerak reformasi birokrasi melalui penguatan sistem digital (SPBE) dan manajemen risiko, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan tanggap.

Berikut ini adalah identifikasi kebijakan nasional dan provinsi yang didukung oleh Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah:

Tabel 3.3
Identifikasi Kebijakan Nasional dan Provinsi
di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Bentuk Dukungan
1	2	3	4	5	6
A	Nasional				
a.	Program Strategis Nasional				
1	Ketahanan Pangan				
2	Kesehatan untuk Semua				
	Makan Bergizi Gratis	Perpres 83 /2024 Tentang BGN, Perpres 12/2025 Tentang RPJMN	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		sebagai perencana, koordinator lintas sektor, fasilitator kerjasama antar pihak terkait, dan pengendali kebijakan di tingkat daerah
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Bentuk Dukungan
1	2	3	4	5	6
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 394.178.800,00	
	Penurunan Angka Prevalensi Stunting	Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Draft Ranperpres RIBK)	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		sebagai perencana, koordinator lintas sektor, fasilitator kerjasama antar pihak terkait, dan pengendali kebijakan di tingkat daerah
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 394.178.800,00	
3	Pertumbuhan Ekonomi				
	Pengendalian Inflasi	Keppres Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		sebagai perencana, koordinator lintas sektor, fasilitator kerjasama antar pihak terkait, dan pengendali kebijakan di tingkat daerah
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
			Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 210.544.200,00	
	Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Perpres 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		sebagai perencana, koordinator lintas sektor, fasilitator kerjasama antar pihak terkait, dan pengendali kebijakan di tingkat daerah
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Bentuk Dukungan
1	2	3	4	5	6
			Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 572.457.800,00	
4	Penanggulangan Kemiskinan				
	Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Inpres 4/2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		sebagai perencana, koordinator lintas sektor, fasilitator kerjasama antar pihak terkait, dan pengendali kebijakan di tingkat daerah
		Permensos No 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
		Perpres 12/2025 tentang RPJMN	*Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia*	Rp 394.178.800,00	
	Sekolah Rakyat	Permensos No 7 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		sebagai perencana, koordinator lintas sektor, fasilitator kerjasama antar pihak terkait, dan pengendali kebijakan di tingkat daerah
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 394.178.800,00	
b.	17 Program Prioritas Nasional				
	3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	Perpres 12/2025 tentang RPJMN			
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Fasilitasi perlindungan HAKI, penguatan tata kelola inovasi yang transparan dan akuntabel, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas SDM dan
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
			Subkegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	40.153.630,00	

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Pagu Indikatif	Bentuk Dukungan
1	2	3	4	5	6
					kelembagaan.
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		sebagai perencana, koordinator lintas sektor, fasilitator kerjasama antar pihak terkait, dan pengendali kebijakan di tingkat daerah
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 69.014.280,00	
	5. Pemberantasan Kemiskinan	Perpres 12/2025 tentang RPJMN	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**		sebagai perencana, koordinator lintas sektor, fasilitator kerjasama antar pihak terkait, dan pengendali kebijakan di tingkat daerah
			Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
			Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 394.178.800,00	
	8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	Perpres 12/2025 tentang RPJMN	**Program Riset dan Inovasi Daerah**		Menyediakan kajian ilmiah, memfasilitasi inovasi teknologi, mendorong transformasi digital, serta memastikan hasil penelitian dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan, sehingga mendukung penguatan pendidikan, sains, teknologi, dan digitalisasi di daerah.
			Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan		
			Subkegiatan Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	53.549.280,00	
B	Provinsi				
5	Meningkatkan Pariwisata dan Kebudayaan	Perda Prov. Kalimantan Selatan No 3 Tahun 2025 Tentang RPJMD Tahun 2025-2033	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**		Menyediakan kajian ilmiah, inovasi pengembangan pendidikan dan kebudayaan, serta rekomendasi kebijakan berbasis data yang dapat menjadi dasar perencanaan dan pengembangan sektor pendidikan dan pelestarian budaya di daerah.
			Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		
			Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	344.462.100,00	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan melalui berbagai sumber dan alokasi pendanaan. Pendanaan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber-sumber lain yang sah. Pentingnya keselarasan antara perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan guna memastikan setiap alokasi dana digunakan secara tepat sasaran dan terukur.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi kepala daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian lndikator Kinerja Utama (IKU) Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Plafon Anggaran yang direncanakan untuk melaksanakan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Hulu Sungai untuk tahun 2027 sejumlah Rp12.674.783.753,00 yang terdiri dari 4 (empat) program, 21 (dua puluh satu) kegiatan dan 61 (enam puluh satu) subkegiatan yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2027.

Rencana Kerja dan kebutuhan pendanaan untuk tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Bapperida Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase kegiatan tepat waktu	100	HST	7.247.807.082,00	DAU		100	6.036.599.696,00
		Persentase laporan tepat waktu	100	HST		DAU		100	
		Nilai audit kearsipan perangkat daerah	100	HST		DAU		100	
		Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti	100	HST		DAU		100	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu	100%	HST	47.043.524,00	DAU		100%	48,204,000.00
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	HST	18.452.260,00	DAU		2 dok	12.704.000,00
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	HST	5.107.960,00	DAU		1 dok	20.000.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dok	HST	3.810.964,00	DAU		1 dok	7.000.000,00
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 doK	HST	19.672.340,00	DAU		4 doK	8.500.000,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	100%	HST	4.180.975.892,00	DAU		100%	4.273.683.200,00
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 OB	HST	3.900.000.000,00	DAU		364 OB	4.000.000.000,00
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dok	HST	211.440.000,00	DAU		12 dok	204.000.000,00
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	HST	5.080.120,00	DAU		12 dok	5.183.200,00
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	HST	20.471.590,00	DAU		1 lap	20.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	4 dok	HST	41.984.380,00	DAU		4 dok	42.000.000,00
5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dok	HST	1.999.802,00	DAU		1 dok	2.000.000,00
5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar	100%	HST	5.348.000,00	DAU		100%	65.353.800,00
5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	HST	5.348.000,00	DAU		12 Laporan	65.353.800,00
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai PD yang terlayani	100%	HST	193.961.948,00			100%	132.165.496,00
5.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	HST	12.243.600,00	DAU		1 Unit	8.729.996,00
5.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dok	HST	14.443.200,00	DAU		24 dok	14.160.000,00
5.01.01.2.05.0008	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	HST	113.275.148,00	DAU		25 orang	51.275.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	HST	54.000.000,00	DAU		5 org	58.000000,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	HST	1.082.611.878,00	DAU		100%	716,112,200.00
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	HST	2.240.600,00	DAU		1 Paket	2.344.000,00
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	HST	542.020.200,00	DAU		1 paket	200.260.000,00
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	HST	73.131.050,00	DAU		1 Paket	72.274.200,00
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	HST	20.999.718,00	DAU		1 Paket	22.000.000,00
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	HST	2.820.000,00	DAU		365 Dokumen	4.000.000,00
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 lap	HST	49.550.000,00	DAU		12 lap	49.600.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	HST	353.065.000,00	DAU		4 Laporan	320.634.000,00
5.01.01.2.06.00010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dok	HST	38.785.310,00	DAU		1 dok	45.000.000,00
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi	100%	HST	352.713.680,00	DAU		100%	0,00
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	12 unit	HST	279.720.000,00	DAU		0	0
5.01.01.2.07.0004	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	HST	72.993.680,00	DAU		0	0
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	HST	940.688.000,00	DAU		100%	433.259.000,00
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	HST	1.612.000,00	DAU		1 laporan	1.713.000,00
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	HST	72.000.000,00	DAU		12 laporan	72.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	HST	867.076.000,00	DAU		12 laporan	359.046.000,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	HST	444.464.160,00	DAU		100%	448.522.000,00
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	HST	68.785.200,00	DAU		1 unit	69.814.000,00
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit	HST	221.598.960,00	DAU		22 unit	222.608.000,00
5.01.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit	HST	36.500.000,00	DAU		30 unit	37.600.000,00
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	HST	98.980.000,00	DAU		1 unit	99.500.000,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 unit	HST	18.600.000,00	DAU		1 unit	19.000.000,00
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	% perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	100%	HST	1.784.360.900,00	DAU		100%	2.756.401.140,00
		% usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan							
		Persentase PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90%							
		Persentase PD dengan MR berjalan baik							
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	% pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya	100%	HST	1.438.264.600,00	DAU		100%	2.412.218.800,00
		% partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan	100%	HST				100%	
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	HST	59.788.700,00	DAU		2 BA	109.754.700,00
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	HST	254.687.300,00	DAU		1	216.146.500,00
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	1 dok	HST	1.123.788.600,00	DAU		1 dok	2.086.317.600,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan							
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan	100%	HST	73.796.600,00	DAU		100%	136.336.100,00
5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	72 orang	HST	73.796.600,00	DAU		72 orang	136.336.100,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	% PD yang menyusun MR	100%	HST	239.531.200,00	DAU		100%	175.936.240,00
		% program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi	100%					100%	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 lap	HST	239.531.200,00	DAU		2 lap	175.936.240,00
5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	% ketersediaan data dan informasi	92%	HST	32.768.500,00	DAU		92%	31.910.000,00
		% ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD	100%					100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 dok	HST	32.768.500,00	DAU		1 dok	31.910.000,00
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	persentase keselarasan RKPD dg RPJMD	100%	HST	1.402.740.480,00	DAU		100%	1.914.358.458,00
		% keselarasan Renja PD dengan RKPD	100%	HST				100%	
		% keselarasan program nasional, provinsi dan daerah	100%	HST				100%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	HST	551.163.940,00	DAU		100%	777.679.229,00
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%	HST				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	HST	38.903.480,00	DAU		2 Dokumen	55.500.000,00
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan	HST	69.014.280,00	DAU		1 Laporan	170.500.000,00
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 dok	HST	49.067.380,00	DAU		2 dok	175.000.000,00
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Lap	HST	394.178.800,00	DAU		1 Lap	376.679.229,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	HST	245.507.600,00	DAU		100%	625.000.000,00
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%	HST				100%	
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dok	HST	34.963.400,00	DAU		2 Dok	35.000.000,00
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Lap	HST	210.544.200,00	DAU		1 Lap	590.000.000,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	% keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	100%	HST	606.068.940,00	DAU		100%	514.679.229,00
		% program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	100%	HST				100%	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	HST	33.611.140,00	DAU		2 Dokumen	35.000.000,00
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Lap	HST	572.457.800,00	DAU		1 Lap	479.679.229,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	% hasil kelitbangan yang termanfaatkan	100%	HST	893.702.927,00	DAU		100%	254.103.281,00
		% HAKI yang difasilitasi	60%	HST				60%	
.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%	HST	344.462.100,00	DAU			0
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 topik	HST	344.462.100,00	DAU		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	% penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	100%	HST	385.951.500,00	DAU			0
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 dok	HST	385.951.500,00	DAU		0	0
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	% pertumbuhan usulan HAKI	100%	HST	163.288.327,00	DAU		100%	254.103.281,00
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 lap	HST	123.134.697,00	DAU		1 lap	204.103.281,00
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 lap	HST	40.153.630,00	DAU		1 lap	50.000.000,00
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase pertumbuhan inovasi	100%	HST	191.762.230,00	DAU		100%	127.000.000,00
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	% kaji terap yang berhasil dilaksanakan	100%	HST	53.549.280,00	DAU			0
5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 pemantauan	HST	53.549.280,00	DAU		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2028	
			Target Capaian Kinerja	Lokasi	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi	100%	HST	138.212.950,00	DAU		100%	127.000.000,00
5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Lap	HST	138.212.950,00	DAU		1 Lap	127.000.000,00

BAB V
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyelenggaraan bidang urusan penunjang perencanaan, riset, dan inovasi daerah oleh Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah diukur melalui keberhasilan pencapaian indikator kinerja secara bertahap. Penilaian ini dibagi ke dalam dua kelompok indikator utama, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai representasi keberhasilan makro organisasi, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang menggambarkan keberhasilan keluaran (output) dari urusan yang ditangani.

5.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan strategis Bapperida dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Berikut ini disajikan tabel Indikator Kinerja Utama:

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
1	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Persentase	97,00	99,00	99,00
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	46,75	56	66
3	Indeks Perencanaan	Indeks	100	98	99
4	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Nilai	22,64	24,5	26
5	Persentase Capaian IKU RKPD	Persentase	92,00	95,00	95,00
6	Persentase PD yang Berkinerja Tinggi	Persentase	92,00	90,00	90,00
7	Rata-rata Tingkat Kematangan Inovasi Daerah	Persentase	60,00	65,00	70,00
8	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,2	85,1	85,75
9	Indeks Inovasi Perangkat Daerah	Indeks	75,68	50	55
10	Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Nilai	84,028	76	77,5

Berdasarkan data target pencapaian tahun 2025 hingga rencana tahun 2027, evaluasi dan arah kebijakan IKU difokuskan pada tiga klaster utama:

1. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) dan Perencanaan: Bapperida berhasil menjaga performa perencanaan daerah dengan capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 80,2 pada tahun 2025. Nilai ini ditargetkan meningkat secara konsisten menjadi 85,75 pada tahun 2027. Sejalan dengan itu, Nilai Komponen Perencanaan SAKIP diproyeksikan naik

dari 22,64 (tahun 2025) menuju 26 (tahun 2027) untuk memastikan perencanaan penganggaran semakin akuntabel.

2. Ekosistem Inovasi Daerah: Penguatan inovasi menjadi prioritas utama. Indeks Inovasi Daerah (IID) yang pada tahun 2025 berada di angka 46,75 ditargetkan melonjak signifikan menjadi 66 pada tahun 2027. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan Rata-rata Tingkat Kematangan Inovasi Daerah yang dipatok mencapai target 70,00 pada tahun 2027.
3. Penyelarasan Target Makro: Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dijaga kestabilannya pada tingkat tinggi, yaitu dari 97% di tahun 2025 menuju target optimal 99% pada tahun 2026 dan 2027.

5.2 INDIKATOR KINERJA KUNCI

Indikator Kinerja Kunci (IKK) menggambarkan keberhasilan teknis operasional dari pelaksanaan program dan kegiatan di setiap bidang kerja Bapperida. Berikut ini disajikan tabel Indikator Kinerja Kunci:

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
1	Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	Persentase	100	100	100
2	Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan	Persentase	100	100	100
3	Persentase PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90 %	Persentase	91,97	93,67	94,67
4	Persentase PD dengan MR berjalan baik	Persentase	0	10	25
5	Persentase keselarasan RKPD dengan RPJMD	Persentase	100	100	100
6	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	Persentase	100	100	100
7	Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah	Persentase	100	100	100
8	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan	Persentase	100	100	100
9	Persentase HAKI yang difasilitasi	Persentase	50	50	60
10	Persentase pertumbuhan inovasi	Persentase	0	10	11
11	Persentase kegiatan tepat waktu	Persentase	97	100	100
12	Persentase laporan tepat waktu	Persentase	100	100	100
13	Nilai audit kearsipan perangkat daerah	Nilai	91,91	93	94
14	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti	Persentase	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
15	Persentase pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya	Persentase	100	100	100
16	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan	Persentase	100	100	100
17	Persentase kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan	Persentase	100	100	100
18	Persentase ketersediaan data dan informasi	Persentase	90	91	92
19	Persentase ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD	Persentase	100	100	100
20	Persentase PD yang menyusun MR	Persentase	100	100	100
21	Persentase program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi	Persentase	87,31	88,81	90,31
22	Persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Renstra, RKPD, Renja PD)	Persentase	100	100	100
23	Persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	Persentase	100	100	100
24	Persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	Persentase	100	100	100
25	Persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	Persentase	100	100	100
26	Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	Persentase	100	100	100
27	Persentase pertumbuhan usulan HAKI	Persentase	33	5	5
28	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi	Persentase	0	5	5
29	Persentase kaji terap yang berhasil dilaksanakan	Persentase	0	5	5
30	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu	Persentase	100	100	100
31	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	Persentase	100	100	100
32	Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar	Persentase	95	100	100
33	Persentase pegawai PD yang terlayani	Persentase	96,93	100	100
34	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Persentase	100	100	100
35	Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi	Persentase	98	100	100
36	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Persentase	90,15	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian 2025	Target 2026	Target 2027
37	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Persentase	98,94	100	100

Analisis terhadap 37 indikator IKK tahun 2025–2027 menunjukkan arah perbaikan tata kelola yang progresif:

1. Akselerasi Manajemen Risiko (MR): Menjawab permasalahan di tahun-tahun sebelumnya, Persentase PD dengan MR berjalan baik yang tercatat 0% di tahun 2025 mulai dipacu menjadi 10% di tahun 2026, dan ditargetkan tumbuh hingga 25% pada tahun 2027 melalui penguatan penginputan profil risiko di aplikasi SAKTI-PUN.
2. Kemandirian Riset dan Perlindungan Kreativitas: Beberapa indikator baru yang tercatat belum memiliki realisasi (0%) di tahun 2025 akibat penyesuaian regulasi perencanaan—seperti Persentase pertumbuhan inovasi, Persentase produk baru dari kegiatan invensi, serta Persentase kaji terap yang berhasil dilaksanakan—mulai didorong secara masif untuk mencapai target masing-masing sebesar 11%, 5%, dan 5% pada tahun 2027. Sementara itu, Persentase HAKI yang difasilitasi ditingkatkan dari 50% menjadi 60%.
3. Konsistensi Dokumen Perencanaan: Bapperida sukses mempertahankan nilai sempurna (100%) pada indikator keselarasan dokumen, mulai dari keselarasan RKPD dengan RPJMD, Renja PD dengan RKPD, hingga keselarasan program nasional, provinsi, dan daerah. Konsistensi ini akan terus dipertahankan hingga tahun rencana 2027.
4. Pelayanan Internal Kesekretariatan: Urusan penunjang seperti tata kelola BMD, administrasi keuangan, dan kearsipan secara umum berada pada kondisi prima dengan capaian di atas 90-95% dan ditargetkan mencapai standar pelayanan minimal penuh (100%) pada tahun 2027.

BAB VI
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang strategis. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan operasional untuk menjabarkan target Rencana Strategis (Renstra) Bapperida 2025–2029 serta menyelaraskannya dengan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun rencana 2027. Sebagai bagian akhir dari sistematika penyusunan dokumen, Bab Penutup ini menguraikan catatan penting, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut nyata demi menjamin efektivitas pencapaian target organisasi.

6.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025, review rancangan awal RKPD, dan formulasi kebutuhan pendanaan, terdapat beberapa catatan krusial yang memerlukan perhatian dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan:

1. Penguatan Ekosistem Riset dan Pertumbuhan Inovasi: Evaluasi hasil Renja menunjukkan perlunya intervensi terfokus pada Program Penelitian dan Pengembangan serta Program Riset dan Inovasi Daerah. Target pemanfaatan hasil riset dan fasilitasi HAKI wajib diakselerasi guna mendongkrak pencapaian target Indeks Inovasi Daerah (IID) yang ditetapkan sebesar 66 pada tahun 2027.
2. Optimalisasi Manajemen Risiko (MR) Perencanaan: Integrasi kerangka mitigasi profil risiko (*risk register*) ke dalam platform sistem pelaporan terintegrasi (SAKTI-PUN) harus diakomodasi oleh seluruh Perangkat Daerah. Langkah ini penting untuk meminimalkan deviasi pencapaian target makro daerah.
3. Keseimbangan Plafon Anggaran dan Kebutuhan Nyata: Total alokasi pendanaan yang direncanakan untuk tahun 2027 adalah sebesar Rp11.520.372.619,00. Pengelolaan anggaran yang terbagi ke dalam 5 program, 20 kegiatan, dan 53 subkegiatan ini harus dikawal secara ketat agar tetap efisien, akuntabel, dan bebas dari inefisiensi belanja.
4. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur: Keterbatasan tenaga fungsional peneliti dan perencana yang kompeten harus segera disiasati melalui

program bimbingan teknis berkala dan usulan pemenuhan formasi jabatan yang terstruktur .

6.2 KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2027 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bappelitbangda serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2027 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029. Rencana kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, Indikator-indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur dan dievaluasi keberhasilan pelaksanaannya.
Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Renja ini, maka kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Kebijakan: Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan rencana kerja ini;
2. Pembangian Peran Internal: Dalam menyelenggarakan perencanaan, Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris dan Kepala Bidang;
3. Dasar Penganggaran: Rencana Kerja (Renja) Bapperida Tahun 2027 menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bapperida;
4. Koordinasi Lintas Sektor: Pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta pemangku kepentingan lainnya guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah.
5. Monitoring dan Evaluasi: Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Bapperida dilakukan secara berkala melalui monitoring capaian kinerja program dan kegiatan serta pelaporan kepada Bupati;
6. Mekanisme Perubahan: Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan kebijakan pembangunan, kondisi keuangan daerah, atau keadaan tertentu, maka dapat dilakukan penyesuaian melalui mekanisme perubahan Renja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai langkah konkret pasca-penetapan dokumen ini, Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Tengah menetapkan garis rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Transformasi dan Sinkronisasi Aplikasi Digital: Segera melakukan integrasi penuh dan optimalisasi fungsionalitas sistem pelaporan kinerja daerah melalui aplikasi SAKTI-PUN, SI IDE HST, dan SIAGENS guna mewujudkan keterpaduan data perencanaan pembangunan.
2. Penyusunan Rencana Aksi Ekosistem Inovasi: Membangun jejaring kemitraan yang sah (MoU) dengan pihak akademisi atau lembaga riset eksternal. Langkah awal ini ditandai dengan pelaksanaan uji kaji terap kebijakan publik dan pendampingan fasilitasi HAKI secara proaktif ke masyarakat.
3. Penyusunan Instrumen Monitoring Berkala: Sekretariat dan Bidang Pengendalian segera menyusun lembar kontrol monitoring capaian target fisik dan keuangan triwulanan. Skema ini didesain agar potensi kegagalan program dapat dideteksi dan diperbaiki secara dini sebelum akhir tahun anggaran.